

## KENDALA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO MULTI HAZARD DI PEMERINTAHAN DAERAH: STUDI KASUS KOTA BUKITTINGGI

Muhammad Azlan ZM<sup>1(a)</sup>, Zikri Alhadi<sup>2(b)</sup>

<sup>1,2</sup>Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

<sup>a)</sup>alanmhd112@gmail.com, <sup>b)</sup>zikrialhadi@fis.unp.ac.id

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

30-03-2026

Diterbitkan Online:

01-06-2026

#### Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan, Multi-Hazard, Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah, Kendala Implementasi

#### Keywords:

Policy Implementation, Multi-Hazard, Disaster Management, Local Government, Implementation Constraints

#### Corresponding Author:

alanmhd112@gmail.com

### ABSTRAK

Implementasi kebijakan manajemen risiko multi-hazard di tingkat daerah sering menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan manajemen risiko multi-hazard di Kota Bukittinggi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama implementasi kebijakan meliputi belum adanya regulasi daerah yang secara spesifik mengatur pendekatan multi-hazard, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah yang belum terlembaga secara sistematis, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan anggaran, serta komunikasi kebijakan yang belum berjalan konsisten antarinstansi. Selain itu, orientasi pelaksanaan kebijakan yang masih cenderung reaktif turut memengaruhi belum optimalnya integrasi kebijakan pengurangan risiko bencana. Temuan ini menunjukkan bahwa kendala implementasi kebijakan bersifat multidimensional dan memerlukan penguatan kelembagaan serta integrasi kebijakan lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko bencana di tingkat daerah.

### ABSTRACT

The implementation of multi-hazard disaster risk management policies at the local government level often encounters various constraints that affect policy effectiveness. This study aims to analyze the inhibiting factors in the implementation of multi-hazard risk management policies in Bukittinggi City. A qualitative approach with a case study design was employed, using interviews, observations, and documentation techniques, and analyzed through George C. Edward III's policy implementation model. The findings indicate that the primary constraints include the absence of specific local regulations governing the multi-hazard approach, limited institutionalized coordination among local government agencies, insufficient human resource capacity and budget support, and inconsistent policy communication across institutions. In addition, the predominantly reactive orientation of policy implementation has hindered the integration of disaster risk reduction programs. These findings demonstrate that implementation constraints are multidimensional and require institutional strengthening and cross-sectoral policy integration to improve the effectiveness of disaster risk management at the local level.

### DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v5i2.379>

## PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan publik pada tingkat daerah tidak selalu berjalan sesuai dengan rancangan kebijakan yang telah ditetapkan secara normatif. Berbagai studi implementasi kebijakan menunjukkan bahwa kegagalan atau belum optimalnya pelaksanaan kebijakan sering kali dipengaruhi oleh faktor struktural, kelembagaan, dan kapasitas organisasi pelaksana yang belum memadai (Edward III, 1980). Dalam konteks penanggulangan bencana, persoalan implementasi menjadi semakin kompleks karena kebijakan yang dijalankan tidak hanya melibatkan satu sektor, tetapi memerlukan koordinasi lintas organisasi, integrasi sumber daya, serta kesamaan persepsi risiko di antara aktor kebijakan.

Perkembangan paradigma penanggulangan bencana menunjukkan pergeseran dari pendekatan responsif menuju pendekatan manajemen risiko yang lebih komprehensif. Pendekatan manajemen risiko multi-hazard menekankan pengelolaan berbagai jenis ancaman bencana secara terpadu karena risiko bencana pada suatu wilayah umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dan berpotensi menimbulkan dampak berlapis (Aji et al., 2021; Aphang Suhendra et al., 2022). Penerapan pendekatan tersebut menuntut kesiapan kelembagaan pemerintah daerah, terutama dalam hal integrasi kebijakan lintas sektor, komunikasi kebijakan yang konsisten, serta dukungan sumber daya yang memadai. Namun, dalam praktik implementasi, tuntutan tersebut sering kali belum diimbangi oleh kapasitas institusional yang memadai sehingga kebijakan menghadapi berbagai kendala pada tahap pelaksanaan.

Kerangka kebijakan nasional telah menegaskan pentingnya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Regulasi tersebut menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam pelaksanaan kebijakan kebencanaan, termasuk dalam penguatan upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Meskipun demikian, penerjemahan prinsip kebijakan yang bersifat nasional ke dalam praktik implementasi di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala yang dipengaruhi oleh variasi kapasitas organisasi, koordinasi kelembagaan, serta keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Sejumlah penelitian implementasi kebijakan kebencanaan di tingkat lokal menunjukkan bahwa hambatan utama pelaksanaan kebijakan sering muncul pada aspek koordinasi lintas sektor, mobilisasi sumber daya, dan konsistensi komunikasi kebijakan (Ristrini et al., 2012; Naufalariiq et al., 2024). Keterbatasan koordinasi antar instansi menyebabkan integrasi program pengurangan risiko bencana belum berjalan secara optimal, sementara perbedaan pemahaman antaraktor kebijakan memengaruhi konsistensi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Selain itu, komunikasi risiko yang belum berjalan efektif turut menghambat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana (Tamitiadini et al., 2019).

Kota Bukittinggi merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik risiko multi-hazard yang cukup kompleks. Letak geografis kota ini berada pada kawasan yang dipengaruhi aktivitas tektonik, berdekatan dengan Gunung Marapi yang aktif secara vulkanik, serta memiliki kondisi topografi berbukit dengan intensitas curah hujan yang relatif tinggi (Firmansyah, 2019). Kombinasi kondisi tersebut menyebabkan wilayah ini berpotensi mengalami berbagai jenis bencana, seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor, yang dapat terjadi secara berurutan maupun bersamaan. Karakter risiko yang berlapis tersebut menuntut implementasi kebijakan manajemen risiko bencana yang tidak hanya komprehensif secara perencanaan, tetapi juga mampu dilaksanakan secara efektif oleh perangkat daerah.

Dalam praktik implementasinya, kebijakan manajemen risiko multi-hazard di Kota Bukittinggi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kapasitas teknis aparatur, koordinasi lintas organisasi yang belum berjalan secara substantif, serta perbedaan persepsi risiko di antara pelaksana kebijakan yang memengaruhi prioritas program kebencanaan. Selain itu, keterbatasan integrasi anggaran dan sarana prasarana kebencanaan turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hambatan implementasi kebijakan bersifat multidimensional dan memerlukan analisis yang lebih sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat utama yang memengaruhi efektivitas kebijakan.

Dalam kajian implementasi kebijakan publik, identifikasi kendala pelaksanaan kebijakan memiliki peran penting karena efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan sistem kelembagaan dalam mengatasi hambatan implementasi yang muncul di tingkat operasional. Berbagai penelitian implementasi kebijakan menunjukkan bahwa hambatan implementasi sering kali bersumber dari ketidaksinkronan antar variabel implementasi, seperti keterbatasan regulasi operasional, kapasitas sumber daya yang belum memadai, serta koordinasi kelembagaan yang belum terlembaga secara sistematis (George C. Edwards, 1980). Penelitian mengenai implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa kendala implementasi dipengaruhi oleh aspek komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan. (Ngesti & Husein, 2024).

Dalam konteks kebijakan penanggulangan bencana berbasis pendekatan multi-hazard, kompleksitas implementasi menjadi lebih tinggi karena kebijakan menuntut integrasi lintas sektor, keselarasan perencanaan antarorganisasi, serta konsistensi komunikasi kebijakan pada berbagai level pemerintahan. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan menjadi penting untuk memahami kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah, sekaligus memberikan dasar analitis bagi penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan risiko bencana yang lebih terpadu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala dan faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan manajemen risiko multi-hazard di Kota Bukittinggi. Analisis penelitian menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagai kerangka analisis untuk mengidentifikasi hambatan implementasi kebijakan secara komprehensif (Edward III, 1980).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang bertujuan mengidentifikasi kendala dan faktor-

faktor penghambat dalam implementasi kebijakan manajemen risiko multi-hazard di Kota Bukittinggi. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam dinamika implementasi kebijakan, interaksi antaraktor, serta konteks kelembagaan yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah.

Lokasi penelitian berada di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, dengan fokus utama pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bukittinggi serta organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan kebencanaan. Informan penelitian dipilih secara purposive, yaitu individu yang memiliki keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan, meliputi pejabat dan staf teknis BPBD, perencana pada Bappeda, aparatur Dinas PUPR, aparat kelurahan di wilayah rawan bencana, serta tokoh masyarakat dan relawan kebencanaan. Untuk memperkuat validitas data lapangan, profil singkat informan penelitian disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 1. Data Informan Penelitian**

No	Instansi/Lembaga	Nama Informan
1.	BPBD (Kalaksa)	Zulhenri
	Kasi PK	Ibem Achsan
	Kasi KL	Doni
	Kasi RR	Aidil Taufik
	Komanda Regu 1	Harry Andika
2.	DPRD Kota Bukittinggi (WK1)	Zulhamdi Chandra
3.	Bappelitbangda (Kabid Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan)	Elly El Rahmah
4.	Dinas Sosial (Kabid Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial)	Hendra
5	Pakar / Ahli (Dosen Kebencanaan di Kota Bukittinggi)	Sudarman

*Sumber: Data Olahan Peneliti*

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan kelembagaan, dokumen Rencana

Penanggulangan Bencana (RPB), Kajian Risiko Bencana (KRB), serta publikasi resmi lembaga terkait. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi mengenai hambatan implementasi kebijakan, koordinasi kelembagaan, serta persepsi aktor kebijakan terhadap pelaksanaan kebijakan multi-hazard.

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara iteratif. Proses analisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai kerangka identifikasi faktor penghambat yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan manajemen risiko *Multi-Hazard* merupakan sebuah paradigma esensial dalam tata kelola kebencanaan, terutama bagi wilayah dengan tingkat kerawanan yang kompleks. Konsep *Multi-Hazard* mengacu pada pendekatan yang mempertimbangkan berbagai jenis bencana yang dapat terjadi secara bersamaan, berurutan, atau saling memperburuk (*compound disasters*). Dalam konteks Kota Bukittinggi, kondisi geografisnya menjadikan wilayah ini sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana yang saling berkaitan, seperti gempa bumi, letusan gunung api, lahar dingin, tanah longsor, dan banjir. Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman di Bukittinggi bersifat *Multi-Hazard*, yaitu potensi bahaya yang dapat terjadi secara bersamaan, berurutan, atau saling memperkuat dampaknya. Oleh karena itu, pendekatan penanggulangan risiko di kota ini tidak dapat lagi bersifat sektoral atau berbasis satu jenis bahaya, melainkan harus dirancang secara terpadu dan antisipatif.

Untuk mewujudkan pendekatan yang komprehensif tersebut, paradigma *Multi-Hazard* harus terintegrasi secara fundamental di dalam dokumen perencanaan strategis daerah, khususnya pada Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Meskipun Pemerintah Kota melalui BPBD telah menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2019-2023, namun pemahaman dan kesiapsiagaan terhadap ancaman tersebut

masih rendah, baik di level institusi maupun masyarakat.

Hal ini mengindikasikan bahwa dokumen perencanaan yang ada membutuhkan pijakan yang lebih kuat operasionalnya. Kendala utama terletak pada belum adanya regulasi daerah yang secara khusus mengatur kebijakan *Multi-Hazard*, sehingga pelaksanaan kebijakan masih bergantung pada ketentuan umum dari BNPB dan pedoman nasional lainnya. Kondisi ini menyebabkan kegiatan kebencanaan di Kota Bukittinggi bersifat sektoral dan belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip manajemen risiko lintas ancaman. Kebutuhan akan landasan kebijakan yang secara spesifik mengatur *Multi-Hazard* menjadi jembatan krusial untuk memastikan dokumen KRB dan RPB dapat diimplementasikan secara kolaboratif. Namun demikian, proses transisi menuju implementasi kebijakan yang terpadu ini masih berhadapan dengan berbagai dinamika di lapangan

### Kendala Implementasi Kebijakan Manajemen Risiko Multi-Hazard

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan manajemen risiko multi-hazard di Kota Bukittinggi masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural dan kelembagaan. Meskipun prinsip pendekatan multi-hazard mulai diperkenalkan dalam kegiatan penanggulangan bencana oleh beberapa organisasi perangkat daerah, penerapannya belum didukung oleh regulasi daerah yang secara spesifik mengatur integrasi kebijakan lintas sektor. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan kebijakan masih berlangsung secara sektoral dan belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan manajemen risiko yang terpadu.

### Hambatan Regulasi dan Struktur Birokrasi

Ketiadaan regulasi daerah yang secara spesifik mengatur pendekatan manajemen risiko multi-hazard tidak hanya berdampak pada lemahnya koordinasi lintas sektor, tetapi juga memengaruhi kepastian kelembagaan dalam pembagian kewenangan pelaksanaan kebijakan. Tanpa adanya dasar hukum operasional yang mengikat, setiap organisasi perangkat daerah cenderung menjalankan fungsi kebencanaan berdasarkan interpretasi sektoral masing-masing, sehingga integrasi kebijakan tidak terbentuk secara sistematis. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur

birokrasi memiliki peran strategis dalam memastikan keterpaduan implementasi kebijakan, karena keberadaan regulasi operasional menjadi instrumen formal yang mengarahkan koordinasi lintas sektor secara berkelanjutan. Dalam perspektif implementasi kebijakan, lemahnya dimensi struktur birokrasi dapat menghambat konsistensi pelaksanaan kebijakan meskipun komitmen organisasi pelaksana relatif memadai.

Selain aspek regulasi, kendala struktur birokrasi juga terlihat pada belum adanya mekanisme koordinasi lintas sektor yang terlembaga dalam bentuk prosedur operasional standar terpadu. Setiap instansi masih menjalankan fungsi kebencanaan berdasarkan kewenangan sektoral tanpa adanya sistem komando kebijakan yang mengintegrasikan seluruh tahapan penanggulangan bencana. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan sering bersifat parsial dan tidak berkesinambungan antara tahap pra-bencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan beberapa informan penelitian yang menyatakan bahwa koordinasi lintas instansi dalam penanggulangan bencana masih belum berjalan secara terpadu.

*“ . . . Kita sudah mencoba mengarahkan OPD supaya programnya memperhatikan risiko bencana, tapi belum semua OPD memahami pentingnya hal itu. Masih banyak yang berpikir bahwa penanggulangan bencana itu urusan BPBD saja.”* (Wawancara dengan Ely, Bappelitbangda, 13-11-2025)

Selain itu, informan dari Dinas Sosial juga menyampaikan bahwa:

*“ . . . Kalau terjadi bencana, kami bergerak di bidang bantuan sosial, terutama untuk pengungsi. Tapi untuk koordinasi dengan instansi lain, terkadang belum maksimal karena belum ada sistem yang mengatur secara jelas. Kami menunggu arahan dari BPBD.”* (Wawancara dengan Hendra, Dinas Sosial, 18-11-2025)

Kemudian Hendra Juga Menyatakan:

*“ . . . Tanpa adanya payung hukum daerah, setiap perangkat hanya akan bekerja sesuai bidangnya masing-masing tanpa arah kebijakan terpadu yang mengatur manajemen risiko secara komprehensif.”* (Wawancara dengan Hendra, Dinas Sosial, 18-11-2025)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan manajemen risiko Multi-Hazard di Kota Bukittinggi masih bersifat sektoral dan belum didukung oleh mekanisme koordinasi lintas sektor yang terintegrasi.

### **Hambatan Sumber Daya**

Keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas teknis aparatur tidak hanya berdampak pada keterbatasan kemampuan operasional dalam penanggulangan bencana, tetapi juga memengaruhi kualitas perencanaan kebijakan berbasis risiko. Pendekatan multi-hazard menuntut kemampuan analisis risiko yang bersifat lintas disiplin, termasuk pemahaman terhadap interaksi antarjenis ancaman bencana, pemanfaatan data spasial, serta pengembangan perencanaan mitigasi terpadu. Apabila kapasitas teknis aparatur belum memadai, maka implementasi kebijakan cenderung berfokus pada respons tanggap darurat dibandingkan pada penguatan mitigasi jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya tidak hanya berkaitan dengan jumlah personel dan anggaran, tetapi juga dengan kualitas kompetensi teknis yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan secara substansial.

Keterbatasan dukungan lintas perangkat daerah menunjukkan bahwa sumber daya kelembagaan dalam implementasi kebijakan manajemen risiko Multi-Hazard belum berjalan optimal. Kondisi tersebut terlihat dari belum meratanya keterlibatan organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan program kebencanaan. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan informan penelitian yang menyatakan bahwa:

*“ . . . Koordinasi kami dengan OPD lain sudah ada, tapi belum semua terlibat aktif. Kadang kegiatan mitigasi masih dianggap tanggung jawab BPBD saja, padahal seharusnya lintas sektor.”* (Wawancara dengan Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Bukittinggi, 10 November 2025).

### **Hambatan Komunikasi Kebijakan**

Komunikasi kebijakan yang belum berjalan secara konsisten antarorganisasi perangkat daerah mengindikasikan bahwa proses transmisi kebijakan belum sepenuhnya menghasilkan kesamaan pemahaman di antara

aktor pelaksana. Perbedaan interpretasi terhadap pendekatan multi-hazard menyebabkan kebijakan kebencanaan masih dipersepsikan sebagai tanggung jawab utama lembaga teknis tertentu, sehingga integrasi kebijakan dalam perencanaan sektoral belum berjalan optimal. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan informan dari BPBD

*“ . . . Koordinasi kami dengan OPD lain sudah ada, tapi belum semua terlibat aktif. Kadang kegiatan mitigasi masih dianggap tanggung jawab BPBD saja, padahal seharusnya lintas sektor.”* (Wawancara dengan Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Bukittinggi, 10 November 2025).

Dalam kerangka implementasi kebijakan, efektivitas komunikasi tidak hanya ditentukan oleh penyampaian informasi kebijakan, tetapi juga oleh kejelasan pesan kebijakan dan konsistensi penyampaian antarlevel organisasi. Apabila komunikasi kebijakan tidak berlangsung secara sistematis, maka koordinasi lintas sektor berpotensi berjalan secara formalistik tanpa menghasilkan kerja kolaboratif yang substantif.

Lemahnya komunikasi kebijakan juga berdampak pada terbatasnya koordinasi operasional antarinstansi. Informasi kebencanaan yang seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan bersama belum terdistribusi secara konsisten, sehingga pelaksanaan program mitigasi sering berjalan secara terpisah dan tidak saling mendukung. Dalam perspektif model implementasi kebijakan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa dimensi communication belum berfungsi secara optimal dalam mendorong implementasi kebijakan terpadu.

### **Hambatan Disposisi Pelaksana**

Dari aspek disposisi pelaksana, komitmen aparatur terhadap kegiatan penanggulangan bencana relatif menunjukkan kecenderungan positif, namun orientasi pelaksanaan kebijakan masih dominan bersifat reaktif. Kondisi ini mencerminkan bahwa persepsi prioritas kebijakan di tingkat operasional masih lebih menekankan pada penanganan pascabencana dibandingkan penguatan mitigasi berbasis risiko. Orientasi kerja yang reaktif tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh rendahnya komitmen pelaksana, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan dukungan regulasi

operasional, kapasitas sumber daya, serta mekanisme koordinasi lintas sektor yang belum terlembaga. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan, dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bukittinggi:

*“ . . . Kalau terjadi bencana, kami bergerak di bidang bantuan sosial, terutama untuk pengungsi. Tapi untuk koordinasi dengan instansi lain, terkadang belum maksimal karena belum ada sistem yang mengatur secara jelas. Kami menunggu arahan dari BPBD.”* (Wawancara dengan Hendra, Dinas Sosial, 18-11-2025)

Dengan demikian, disposisi pelaksana kebijakan tidak dapat dipahami sebagai faktor yang berdiri sendiri, melainkan sebagai variabel implementasi yang dipengaruhi oleh interaksi faktor komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi.

### **Analisis Integratif Kendala Implementasi**

Berbagai kendala yang ditemukan menunjukkan bahwa hambatan implementasi kebijakan manajemen risiko multi-hazard di Kota Bukittinggi bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Ketiadaan regulasi daerah menjadi faktor awal yang memengaruhi lemahnya struktur birokrasi dan koordinasi lintas sektor, yang selanjutnya berdampak pada ketidakterpaduan komunikasi kebijakan dan pemanfaatan sumber daya. Dalam waktu yang sama, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan anggaran memperkuat kecenderungan pelaksanaan kebijakan yang bersifat reaktif, sehingga pendekatan multi-hazard belum terimplementasi secara optimal.

Dalam kerangka model implementasi kebijakan George C. Edward III, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keempat variabel implementasi, komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi masih menghadapi hambatan mendasar yang memengaruhi efektivitas kebijakan. Dengan demikian, kendala implementasi kebijakan tidak berdiri sendiri pada satu faktor tertentu, melainkan merupakan hasil interaksi antarvariabel implementasi yang belum berfungsi secara sinergis dalam mendukung penerapan kebijakan manajemen risiko multi-hazard di tingkat daerah.

## PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan manajemen risiko multi-hazard di Kota Bukittinggi masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, kelembagaan, dan operasional. Hambatan utama terlihat pada belum adanya regulasi daerah yang secara spesifik mengatur penerapan pendekatan multi-hazard, sehingga koordinasi lintas organisasi perangkat daerah belum terlembaga secara sistematis dan masih bergantung pada inisiatif sektoral masing-masing instansi. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, sarana teknis, serta dukungan anggaran yang belum terintegrasi turut memperkuat kecenderungan implementasi kebijakan yang bersifat parsial dan reaktif. Selain itu, komunikasi kebijakan yang belum berjalan konsisten menyebabkan perbedaan pemahaman antar instansi terhadap pendekatan multi-hazard, sementara disposisi pelaksana yang relatif positif belum sepenuhnya didukung oleh instrumen kelembagaan yang mendorong pelaksanaan kebijakan secara preventif dan terpadu. Temuan ini menegaskan bahwa kendala implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor tunggal, melainkan oleh interaksi berbagai variabel implementasi yang belum berfungsi secara sinergis dalam mendukung efektivitas kebijakan pengelolaan risiko bencana di tingkat daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Framework, S., & Reduction, D. R. (2015). *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030* (Issue March).
- George C. Edwards, I. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press in English. [https://openlibrary.org/books/OL4108847/M/Implementing\\_public\\_policy](https://openlibrary.org/books/OL4108847/M/Implementing_public_policy)
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Aji, L. J., Meiliasari, D. P., Apriyadi, R. K., Maarif, S., Sumantri, S. H., & Wilopo, W. (2021). Kapasitas pengurangan risiko bencana multi-hazard pemerintah Kabupaten Pidie Jaya guna mendukung keamanan nasional. *PENDIPA Journal of Science Education*, 6(1), 64-72.
- Aphang Suhendra, et al. (2022). Multi-hazards disaster risk assessment in Magetan Regency, Indonesia. *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, 7(2), 162-170.
- Firmansyah, D. S. J. R. (2019). e Risk Effect of Baseline of Component Correlation on the of GNSS The Assessment Multi Hazard Area: A Case of Design Mitigation Consider in Network Con guration for Sermo Reservoir Deformation Monitoring Spatial Planning of Bukittinggi City. *Indonesian Journal of Geography*, 51(2), 20.
- Naufalariiq, V. S., Roekminiati, S., Pramudiana, I. D., Pramono, S., & Sunarya, A. (2024). Evaluasi implementasi kebijakan program Desa Tangguh Bencana dalam perspektif hexahelix assessment di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(3), 636-650.
- Ristrini, R., Rukmini, R., & Oktarina, O. (2012). Analisis implementasi kebijakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana bidang kesehatan di Provinsi Sumatera Barat. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 15(1), 91-102.
- Tamitiadini, D., Dewi, W. W. A., & Adila, I. (2019). Inovasi model mitigasi bencana non struktural berbasis komunikasi, informasi, koordinasi dan kerjasama. *Jurnal Komunikasi*, 13(1), 41-52.
- Ngesti, T. H. A., & Husein, R. (2024). Implementasi Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana terhadap Perempuan di Kabupaten Bantul. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1), 764-771. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3227>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Retrieved from <http://peraturan.go.id>

UNDR. (2020). Hazard definition & classification review: Technical Report. *Hazard Definition & Classification Review*

*Review*, 88.  
<https://www.undrr.org/publication/hazard-definition-and-classification-review>